

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan program setiap institusi atau unit kegiatan adalah ketersediaan anggaran yang kemudian disalurkan pada setiap sisi program yang disediakan atau program yang direncanakan dengan melalui pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausaha/akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang atau dana publik telah dibelanjakan secara efisien, dan efektif, dengan demikian susunan pemerintahan dari sistem lama sangat dibutuhkan guna terwujudnya pemerintahan yang dapat dikatakan baik dimana pemerintah pusat yang kuat dalam memutuskan kebijakannya.

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen-departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada masyarakat. Hadirnya perkembangan teknologi pada saat ini mempengaruhi

perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia yang semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pada jaman reformasi sekarang ini, system pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan diperbandingkan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dapat memperlihatkan tingkat ketercapaian target-target yang telah di sepakati antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan perundang-undangan. Informasi dari laporan realisasi anggaran berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran dengan menyediakan informasi realisasi anggaran secara menyeluruh sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran (Makaminang et al., 2022). Laporan realisasi anggaran memiliki manfaat sebagai alat prediksi seberapa besar perolehan sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintah atau daerah pada periode atau tahun yang akan datang dengan menyajikan laporan yang komparatif. Indikasi perolehan dan penggunaan dari sumber daya ekonomi yang disediakan laporan realisasi anggaran kepada para pengguna laporan diantaranya yang pertama, telah terlaksana secara efektif, efisien, dan hemat. Kedua, telah terlaksana sesuai anggaran baik APBN atau APBD. Ketiga, telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lasupu et al., 2021). Dalam sebuah instansi atau lembaga, anggaran sangat berperan penting dan menjadi acuan terlaksananya kegiatan atau program pada suatu instansi tersebut.

Menurut (Lasupu et al., 2021) mengatakan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan menurut (Febrianty Milenia et al., 2022) efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dan efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Sedangkan menurut penelitian (Tuju, 2022) menyatakan efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien. Pengukuran tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran keuangan daerah karena anggaran dalam pemerintah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan apabila penggunaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien maka hal ini akan mendorong terwujudnya tujuan pemerintah yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (Farhan & Djuni, 2023).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menjadi unsur perencanaan penyelenggara pemerintah daerah yang juga mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta memiliki wilayah kerja seluruh Provinsi Bali. Dalam menjalankan tugasnya Bappeda harus merencanakan, melaksanakan dan harus mempertanggungjawabkan untuk itu setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda ini diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan tidak cukup apakah anggaran

belanja sudah direalisasikan dengan baik dan dengan laporan secara lisan akan tetapi harus di dukung juga dengan laporan keuangan secara tertulis (Makaminang et al., 2022). Laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda ini dituangkan dalam bentuk LKjIP gunanya untuk menilai tingkat ketercapaian target anggaran apakah telah menggunakan anggaran dengan semestinya serta untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan.

Berikut ini data realisasi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2019-2023 yang ditungkan di dalam LkjIP sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019-2023

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran (Rp)
2019	48.021.426.287,75	41.248.673.398,07	86%
2020	19.371.881.589,00	18.134.298.065,36	94%
2021	23.587.842.782,00	21.097.704.767,00	89%
2022	22.141.607.206,00	20.561.853.899,12	93%
2023	24.650.120.464,00	20.164.186.635,00	82%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja dari tahun 2019-2023 selalu lebih rendah dari pada target anggaran. Kemudian dikutip dari laman kemendagri (Kementrian Dalam Negri) Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) Agus Fatoni menyatakan bahwa Bali masuk ke dalam daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan salah satu daerah yang mendapat APBD Award 2023. Berikut daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi untuk provinsi, daerah tersebut yakni Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di Provinsi Bali sudah bagus

dibandingkan dengan provinsi lain. Namun dari sisi pengelolaan anggaran belum diketahui apakah dapat dinyatakan secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2019-2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara realisasi dan target anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
2. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang belum terukur.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis membatasi masalah yaitu :

1. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019 hingga 2023.
2. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran menggunakan indikator-indikator yang relevan dengan pengelolaan anggaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2019 -2023?
2. Bagaimana efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019-2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui efisiensi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019-2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan dan menambah wawasan akademik dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya tentang

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan kajian pendukung untuk peneliti yang membahas topik sejenis, agar memperoleh informasi dan pemahaman tambahan terkait dengan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dan memberikan sumbangan konseptual dalam membantu mahasiswa melakukan penelitian mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi.

3) Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.